

Warta Satu Data Indonesia

Perkembangan Terkini Seputar Satu Data Indonesia



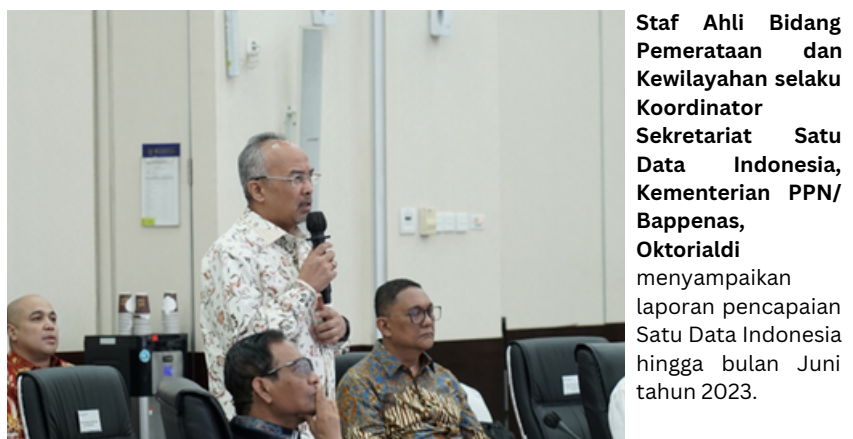
Rapat Dewan Pengarah Tahun 2023 di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat

RAPAT DEWAN PENGARAH

Menteri PPN/
Kepala Bappenas,
Suharso Monoarfa
memimpin Rapat
Dewan Pengarah
Satu Data Indonesia
(SDI) Tahun 2023



Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberi apresiasi kepada Sekretariat Satu Data Indonesia yang terus membangun koordinasi antar seluruh pihak di Kementerian dan Lembaga. Satu Data Indonesia harus menjadi imej Indonesia ke negara lain bahwa kita memiliki data yang terintegrasi sama dengan negara-negara lainnya.



RAPAT DEWAN PENGARAH

Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa (kanan) dan Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia, Oktorialdi (kiri).



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menjelaskan domain data dan informasi pada arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional melalui penerapan SDI menjadi pondasi dalam penopang layanan digital nasional.

Plt Menteri Komunikasi dan Informatika, M. Mahfud MD, menyampaikan terkait ide Pemerintah tentang E-Governance yang telah dituangkan seperti pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang masih diperlukan peningkatan dan percepatan dalam beberapa aspek dan domain.



Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai menyampaikan usulannya terkait pengelolaan kompetensi pelatihan informasi geospasial yang diperuntukkan bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah, agar mendukung penerapan SDI yang lebih kompeten di bidang spasialnya.

Kepala Badan Inovasi Riset Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko menyatakan BRIN akan terus mendukung dataset, pemanfaatan beragam dataset, serta memanfaatkan teknologi terkini seperti AI untuk meningkatkan kemanfaatan dari beragam dataset yang sudah ada.



Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, menyampaikan BSSN siap mendukung layanan Satu Data Indonesia untuk tata kelola dan platform pertukaran data sebagai bagian dari *Digital Public Infrastructure SPBE* dan mendukung penguatan kolaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan daerah.



Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik, Imam Machdi menyampaikan terkait pertukaran data di dalam ekosistem Data Nasional sangat diperlukan. Sehingga perlu adanya integrasi termasuk sistem infrastruktur Statistik Nasional yang sedang dikembangkan berdasarkan amanah Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur SPBE.



Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menegaskan Kemendagri mendukung implementasi Satu Data Indonesia terutama lewat data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan SPBE.

Kementerian PPN/Bappenas memimpin pelaksanaan Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI) 2023 yang menghasilkan 2 Poin Kesepakatan

Penyepakatan 1

Penyediaan Platform Pertukaran Data sebagai Bagian dari *Digital Public Infrastructure*

- Penyusunan Regulasi Pertukaran Data Mentah (*Raw Data*) dan Data Individu sebagai turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
- Penetapan Pengampu Data untuk Masing-masing Domain Layanan Digital Nasional dan Data Induk Registrasi Sosial Ekonomi
- Penganggaran Pengembangan dan Operasionalisasi Platform Pertukaran Data untuk Keterpaduan Layanan Digital Nasional
- Pengembangan Platform dan Tata Kelola Pertukaran Data untuk Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Penyepakatan 2

Penguatan dan Kolaborasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah

- *Enforcement* dan Peningkatan Partisipasi Implementasi SDI
- Sinkronisasi dan Kolaborasi SDI Pemerintah Daerah melalui Penyediaan Pedoman yang Terstruktur dan Sistematis
- Penataan Program, Kegiatan, hingga Belanja Data Pemerintah dalam Kerangka SPBE
- Penguatan Kerangka Regulasi Satu Data Indonesia
- Kolaborasi Program Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi

Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia Tahun 2023: Menuju Satu Data Indonesia yang Berdampak



Kementerian PPN/Bappenas menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI) tahun 2023 yang dipimpin oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Plt Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hansa Siburian, Kepala Badan Inovasi Riset Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Imam Machdi, serta Teguh Setyabudi Diantoro Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.

“Pertemuan ini bertujuan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia yang Berdampak, dimana Satu Data Indonesia telah menghasilkan berbagai pencapaian selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk membangun landasan terselenggaranya Satu Data Indonesia baik di tingkat Pusat

dan tingkat Daerah. Mulai dari aspek kelembagaan dan regulasi, pembangunan sistem aplikasi yang dibutuhkan, serta pendampingan berupa sosialisasi dan asistensi guna memudahkan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan “Satu Data Indonesia,” ujar Menteri Suharso pada Rapat Dewan Pengarah SDI yang diselenggarakan di Gedung Bappenas, Selasa (11/7/2023).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan berdasarkan Instruksi Presiden Jokowi bahwa SDI dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus diintegrasikan. Interaksi antara hulu dan hilir perlu dikalibrasi agar menjadi satu *service* atau satu *interface*. Sehingga dibutuhkan koordinasi antara Kementerian/Lembaga/Daerah untuk mendukung terwujudnya pengumpulan data secara terpusat, kemudian akan berdampak terhadap layanan publik, efisiensi anggaran, hingga ketepatan sasaran program pemerintah.

Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia tahun 2023 telah menyepakati 2 poin penting serta strategi dan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Kesepakatan pertama yaitu penyediaan platform pertukaran data sebagai bagian dari *Digital Public Infrastructure* melalui (1) penerbitan regulasi pertukaran data mentah dan data individu sebagai turunan undang-undang perlindungan data pribadi, (2) penetapan pengampu data untuk masing-masing domain layanan digital nasional dan data induk registrasi sosial ekonomi, (3) penyediaan penganggaran pengembangan dan operasionalisasi platform pertukaran data untuk keterpaduan layanan digital nasional, dan (4) pengembangan platform dan tata kelola pertukaran data untuk keterpaduan layanan digital nasional.

Kolaborasi antara SPBE di tingkat pusat dan daerah, serta SDI menjadi langkah mempercepat transformasi digital.

(Bersambung ke halaman 5) >

Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia Tahun 2023: Menuju Satu Data Indonesia yang Berdampak

(Sambungan dari halaman 4)

"Percepatan transformasi digital juga dilakukan dengan kolaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) baik tingkat pusat maupun daerah melalui sinkronisasi dan kolaborasi SDI, penyediaan pedoman yang terstruktur dan sistematis, serta peningkatan partisipasi implementasi SDI," jelas Anas.

Menurutnya, dua pekerjaan rumah utama yang menjadi fokus saat ini yaitu keterpaduan layanan publik yang dirangkum pada SPBE dan keterpaduan data SDI. "Keterpaduan pelayanan publik pasti memerlukan keterpaduan data. Sehingga bila ke depan ini sukses, sesuai arahan Presiden Jokowi, Indonesia akan memiliki satu skema pelayanan publik terintegrasi yang berbasis data," ujarnya.

Senada dengan Dewan Pengarah lainnya, Kepala Badan Inovasi Riset Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, menyampaikan bentuk dukungannya terhadap SDI berkait-

an dengan data riset dan inovasi serta dukungan teknis Data Prioritas dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.

"Tidak hanya itu harapan kedepan bahwa portal SDI segera dapat diintegrasikan sehingga dapat menjadi evaluasi bersama yang diadopsi bersama sehingga tidak terjadi tumpang tindih monitoring dan evaluasi antara SDI, BPS, BIG dan SPBE." jelas Laksana.

Kesepakatan kedua yaitu, Penguatan dan Kolaborasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah melalui (1) *enforcement* dan peningkatan partisipasi implementasi SDI, (2) sinkronisasi dan kolaborasi SDI pemerintah daerah melalui penyediaan pedoman yang terstruktur dan sistematis, (3) penataan program, kegiatan, hingga belanja data pemerintah dalam kerangka SPBE, (4) penguatan kerangka regulasi Satu Data Indonesia, (5) kolaborasi program pelatihan untuk peningkatan kompetensi.

Diperlukan upaya lintas sektor untuk memperkuat dan mengelaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Satu Data Indonesia juga menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan mendukung Transformasi Digital Nasional.

"Kita juga menginginkan seluruh data yang ada ini supaya kita tidak duplikasi (dalam) memproduksi data, itu kan yang kita hindari supaya terjadi efisiensi terhadap anggaran demikian juga terhadap platform," pungkas Menteri Suharso.



12 Juli 2023

Kunjungan Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

untuk berdiskusi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat



Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Provinsi Sumatera Utara Bukti Komitmen dengan Satu Data Indonesia



Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 melalui Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Menindaklanjuti hal tersebut, diselenggarakanlah Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Utara, pada hari Selasa (18/07/2023) di Kota Medan, Sumatera Utara.

Acara dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Agus Tripiyono, yang mengatakan bahwa melalui forum Satu Data Indonesia (SDI) ini diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan koordinasi Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data yang dilakukan secara berkala dalam rangka menyelesaikan permasalahan satu data yang terintegrasi khususnya di Wilayah Sumatera Utara.

Oktorialdi, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/ Bappenas selaku

“Data yang akurat sangat diperlukan di dalam perencanaan, pembangunan, sehingga nantinya pemangku kepentingan bisa mengambil keputusan yang tepat.”

Agus Tripiyono

Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Utara

Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menjelaskan bahwa untuk menjalankan SDI dengan baik diperlukan prinsip-prinsip seperti standarisasi data, ketersediaan data yang diminta, otoritas data yang terintegrasi, dampak data yang dapat dibandingkan, serta kode referensi yang jelas untuk mengatur identitas dan Lembaga terkait dengan melibatkan berbagai Kementerian dan Institusi terkait.

Selain itu, Pemprov perlu mengelola data dengan sistem SDI termasuk data mengenai pendapatan perkapita di berbagai Provinsi, sehingga nantinya dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengarahkan upaya pembangunan secara efektif.

Dalam kegiatan ini turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Ilyas S. Sitorus, serta Perangkat Daerah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumut.

Memiliki data yang akurat, terintegrasi, dan terpercaya adalah kunci penting untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan seperti peningkatan pendapatan per kapita, mengurangi kemiskinan menjadi 0%, mengurangi ketimpangan, memperkuat pengaruh internasional, dan mencapai target *net zero* intensitas gas rumah kaca. SDI yang menggambarkan inisiatif untuk mengintegrasikan berbagai data dari berbagai sumber dan sektor dapat membantu Pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam upaya mencapai tujuan strategis tersebut.

Kepala BPS Sumatera Utara, Nurul Hasanudin, menambahkan pentingnya prinsip SDI dan Sistem Statistik Nasional untuk memperkuat kualitas data dan meningkatkan sinergi antar lembaga. Implementasi prinsip SDI yang melibatkan berbagai pihak dan institusi, termasuk Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan data berkualitas, memperkuat sistem statistik nasional, dan meningkatkan interoperabilitas data sangat relevan dengan perencanaan pembangunan nasional. Terlebih, seluruh kegiatan ini memerlukan data yang akurat dan dapat dipercaya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pengadaan dan perbaikan infrastruktur, seperti jalan, yang merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan nasional.

Peluncuran Portal Satu Data Migran Indonesia sebagai Komitmen BP2MI dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meluncurkan Portal Satu Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Anjungan Informasi Mandiri pada hari Senin, 31 Juli 2023. Portal Satu Data PMI hadir sebagai sistem untuk melindungi 4,7 juta pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara penempatan.

Sampai hari ini, BP2MI telah menerima sedikitnya 45.000 pengaduan yang sangat beragam dari pekerja migran Indonesia. Diharapkan sinergi ini mampu memperkuat tata kelola pekerja migran Indonesia semakin komprehensif. Modernisasi tata kelola pekerja migran juga turut membantu melawan mafia atau sindikat penempatan ilegal.

Staf Ahli bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/ Bappenas selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia, Oktorialdi menyampaikan setiap Kementerian dan Lembaga bisa berkontribusi serta berkolaborasi dalam pertukaran data. Ketersediaan data yang masif terkait pekerja migran diharapkan mampu menjadi bahan untuk melahirkan kebijakan nasional ke depan.



Portal Satu Data PMI yang telah terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia itu juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan bahwa Portal Satu Data PMI dan Anjungan Informasi Mandiri merupakan salah satu dari sembilan program prioritas BP2MI yaitu modernisasi sistem pendataan secara terintegrasi.

"Dengan adanya Portal Satu Data PMI yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia itu menunjukkan komitmen BP2MI dalam mewujudkan data perlindungan PMI yang terbuka dan transparan," tuturnya.

Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Badan Pusat Statistik (BPS).



Kolaborasi Pemetaan Isu Strategis Satu Data Indonesia Bersama Kementerian Koordinator

Kementerian Koordinator memiliki peran sentral dalam membina koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintahan di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas harmonisasi kebijakan sektor-sektor strategis, Kementerian Koordinator berfokus pada pemetaan isu-isu krusial yang mempengaruhi kemajuan bangsa.

Melalui pendekatan komprehensif dan kerjasama antar kementerian, pemetaan isu strategis diperlukan untuk mengatasi tantangan nasional dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu diadakan kegiatan rapat bersama Kementerian Koordinator pada hari Kamis (20/07/2023) di Ruang BSM, Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat.

Acara dibuka oleh Hari Dwi Korianto selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia, menyampaikan bahwa SDI sebagai perwujudan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang memiliki tujuan terkait penguatan data dalam perencanaan kedepan yang lebih baik lagi. Untuk itu SDI mengajak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk terlibat aktif dan berkolaborasi dalam pelaksanaan pemetaan isu strategis untuk penyelenggaraan data pembangunan. Selain itu SDI mengharapkan masukan dari Kemenko dalam tantangan pembangunan lintas sektor dalam bentuk isu strategis pada pembangunan Indonesia kedepan.



Dicky Rahardianto selaku Manajer Bidang Perencanaan, Analisa dan Pemanfaatan Data Sekretariat SDI menjadi moderator pada kegiatan ini yang menjelaskan adapun 8 isu strategis yang diusulkan oleh SDI meliputi: (1) Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial, (2) Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, (3) Peningkatan Investasi, (4) Infrastruktur Layanan Dasar, (5) Isu Lingkungan (*Climate Change* dan Emisi Rumah Kaca), (6) Penurunan Angka Stunting, (7) Peningkatan Kualitas Pendidikan, dan yang terakhir adalah (8) Ketenagakerjaan.

Andi Rahmadi, selaku Kepala Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kemenko PMK menyampaikan dukungannya kepada SDI dan mengharapkan dengan adanya SDI, ketersediaan data aktual yang memenuhi standar kualitas sebagai bahan merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung penanganan isu strategis secara efektif bisa terpenuhi.

Tidak hanya itu, Samuel, selaku Koordinator Dukungan Kebijakan Strategis, Kemenko Marves menyatakan dukungan pada 8 isu strategis yang sudah diidentifikasi oleh SDI. Tidak hanya itu, kedepan perlu memperhatikan ruang lingkup atau cakupan isu strategis nasional agar dapat ditangani oleh Kementerian Koordinator dan K/L sesuai dengan tupoksinya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan mengatasi tantangan yang kompleks.

Melalui pemetaan isu strategis Satu Data Indonesia bersama Kementerian Koordinator, tentunya SDI berkomitmen untuk mencapai visi bersama dan membangun sinergi guna meraih kemajuan bagi Indonesia. Dengan kerjasama yang kokoh dan pendekatan yang holistik, diharapkan masalah-masalah yang terjadi dapat diatasi dengan lebih efektif dan berkelanjutan, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaya saing di tingkat global.

LPDB-KUMKM Optimis Tahun 2023 Mencapai Target Penyaluran Dana Bergulir



Jarot Wahyu Wibowo
Direktur Pengembangan
Usaha LPDB-KUMKM

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi adalah satuan kerja di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman/pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan UKM.

Dana bergulir sendiri adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian/Lembaga.

Dengan dibentuknya LPDB-KUMKM diharapkan pengelolaan dana bergulir dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dan menghasilkan manfaat berkelanjutan atas penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan UMKM. Selain itu, LPDB juga merupakan salah satu lembaga yang menjadi prioritas dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.

LPDB juga menyediakan bantuan dana dengan bunga yang cukup rendah dibandingkan lembaga keuangan komersial atau memberikan pinjaman tanpa disertai agunan (untuk pembiayaan kelompok). Hal ini tentu saja dapat meringankan masyarakat di bidang UMKM yang selama ini mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan komersial dengan bunga yang cukup tinggi.

Berdasarkan data LPDB-KUMKM pada sepanjang tahun 2022 berhasil menyalurkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir sebesar Rp1,86 triliun dan sebanyak 193 koperasi yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air telah menjadi mitra koperasi penerima dana tersebut. Rencananya pada tahun 2023, LPDB-KUMKM menetapkan target penyaluran dana bergulir sebesar Rp 1,8 triliun.

Hingga bulan Juli 2023, LPDB-KUMKM telah berhasil menyalurkan dana bergulir sebesar Rp895 miliar yang dilakukan dengan dua pola yakni konvensional dan syariah. Untuk pola konvensional telah disalurkan sebesar Rp596 miliar, dan pola syariah sebesar Rp298 miliar.

Pencapaian ini menjadikan LPDB-KUMKM optimis untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp1,8 triliun sepanjang tahun 2023.

“Pertumbuhan dari tahun ke tahun untuk koperasi sektor riil mengalami peningkatan dan tentu saja hal ini menjadi harapan dari Bapak Teten Masduki Menteri Koperasi UKM untuk sektor riil agar lebih difokuskan, karena menyangkut UKM yang banyak di Indonesia.”

Langkah Strategis LPDB-KUMKM

Selain itu, Jarot juga menambahkan bahwa LPDB-KUMKM memiliki strategi dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir.

Langkah-langkah strategis ini meliputi penyederhanaan proses pengajuan, peningkatan pemantauan dan pengawasan, serta penguatan kolaborasi dengan mitra strategis untuk memastikan keberhasilan penyaluran dana bergulir.

LPDB-KUMKM juga mengembangkan ekosistem bisnis koperasi yang berdaya saing dan saling terintegrasi dari proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang dilaksanakan melalui pilot project bersama pemerintah pusat, daerah, hingga asosiasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kemudian strategi untuk pola syariah, LPDB-KUMKM kembali melibatkan berbagai komponen mulai dari persatuan BMT, InkopSyah, dan Koperasi Pondok Pesantren. Hal ini lantaran, saat ini berbagai komunitas ekonomi syariah khususnya komunitas koperasi syariah sedang berlomba-lomba berbenah diri agar dapat lebih baik dan bisa mendapatkan pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

(Bersambung ke halaman 10) >

LPDB-KUMKM Optimis Tahun 2023 Mencapai Target Penyaluran Dana Bergulir

(Sambungan dari halaman 9)

LPDB-KUMKM optimis pada tahun 2023 ini, dapat melampaui target penyaluran dana bergulir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan tidak akan berhenti melakukan inovasi digital dalam mendukung kinerja penyaluran dana bergulir kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia.

"Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, LPDB-KUMKM akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, sektor perbankan, maupun mitra strategis lainnya," tambah, Jarot Wahyu.

Disamping menyalurkan dana bergulir dengan prinsip Tri Sukses

yakni Sukses Penyaluran, Sukses Pemanfaatan, dan Sukses Pengembalian, LPDB-KUMKM juga menyalurkan dana bergulir dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian melalui implementasi Good Corporate Government agar dana yang disalurkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, dan juga bisa dikembalikan secara maksimal oleh mitra koperasi.



DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

17 Agustus 2023



Penanggung Jawab
Oktorialdi

Tim Penyusun

1. Nurhadi Prasetyo
2. Tridias Soja Anggraini
3. Prita Ramadiani
4. Galih Yudhasena Trenggala
5. Finda Fadilla
6. Rynaldi Tallamma

Kontributor

Jarot Wahyu Wibowo

Sekretariat Satu Data Indonesia

Jl. Karawang No.4, RW.4, Menteng, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
+62 822-6000-7040



data.go.id



[data.go.id](https://www.instagram.com/data.go.id)



[datagoid](https://twitter.com/datagoid)